

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 1999, Indonesia telah menerapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasar asas otonomi. (Ritonga *et. al*, 2012). Pemberlakuan otonom memberikan pemerintah daerah peluang yang lebih besar untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia, dana maupun kekayaan lainnya (Adi, 2012). Pada era otonomi daerah saat ini, transparansi mengenai pengelolaan keuangan pemerintah menjadi sangat penting. Masyarakat berharap bahwa otonomi daerah menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat, serta membudayakan dan menciptakan ruang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002).

Pengelolaan keuangan yang transparan menjadi tuntutan masyarakat guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Dalam mekanisme tata kelola, pelaporan keuangan memiliki dua tujuan, yaitu organisasi yang transparan dan keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Hess, 2007). Masyarakat memiliki hak dasar untuk tahu (*basic right to know*) dan memperoleh informasi mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah, dan mengapa suatu kebijakan atau program dilakukan (Stiglitz, 1999) serta bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya (Silver, 2005).

Tekanan institusional cenderung berkembang di mana pengukuran dan kontrol yang lemah atau tidak tepat, yaitu di mana akuntabilitas rendah (Frumkin dan Galaskiewicz, 2004). Rendahnya akuntabilitas ini menggambarkan rendahnya keinginan organisasi publik untuk penerapan transparansi pelaporan keuangan. (Basuki dan Ridha, 2012). Isomorfisme (*isomorphism*) adalah proses yang mendorong satu unit dalam suatu populasi untuk menyerupai unit yang lain dalam menghadapi kondisi lingkungan yang sama (Hawley, 1968). Organisasi publik yang cenderung untuk memperoleh legitimasi akan cenderung memiliki kesamaan atau isomorfisme dengan organisasi publik lain (DiMaggio dan Powell, 1983).

Menurut Basuki dan Ridha (2012), penelitian empiris di Indonesia mengenai penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah belum banyak ditemui. Peneliti termotivasi untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Penelitian ini bertujuan memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan di pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan transparansi pelaporan keuangan yang didorong oleh adanya tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, kompetensi sumber daya manusia, aksesibilitas laporan keuangan, dan faktor politik.

Tekanan eksternal adalah tekanan yang berasal dari luar SKPD seperti peraturan (regulasi), eksekutif, masyarakat, dan sebagainya. Adanya tekanan

eksternal dapat berakibat pada praktik-praktik SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang hanya bersifat formalitas untuk memperoleh legitimasi. Praktik-praktik yang dimaksud dalam penelitian ini di khususkan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan (Basuki dan Ridha, 2012).

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh tekanan eksternal terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Basuki dan Ridha (2012), Sihaoloho (2013), dan Hastuti (2015) menunjukkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, berupa peraturan yang menjadi pemicu diterapkannya transparansi pelaporan keuangan. Julita dan Belian (2015) dan Dewi *et.al.* (2015) meneliti variabel yang sama dengan hasil tekanan eksternal tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Ketidakpastian lingkungan adalah kondisi dimana SKPD mengalami ketidakpastian yang dapat disebabkan adanya pengaruh dari luar SKPD, seperti sering terjadinya perubahan peraturan, tidak padunya antara peraturan yang satu dengan yang lain, terjadinya mutasi staf SKPD yang cepat, dan lain sebagainya. SKPD dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, baik dalam praktik maupun operasionalnya. Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini dikhususkan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan (Basuki dan Ridha, 2012).

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Basuki dan Ridha (2012), Sihaloho (2013), dan Hastuti (2015) menunjukkan bahwa

ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Fardian (2014), Julita dan Belian (2015), dan Satyaningsih et., al., (2014) melaksanakan penelitian dengan variabel yang sama menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Paine (1994) menyatakan bahwa strategi integritas merupakan sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih menuntut daripada sekedar inisiatif kepatuhan atas hukum maupun peraturan. Integritas dan kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen manajemen yang kuat. Manajemen seharusnya mengembangkan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk sukses dalam jangka panjang. Selain itu, manajemen secara pribadi juga terlibat untuk memastikan bahwa sistem manajemen SKPD yang dikembangkan dan diimplementasikan sudah berjalan. Sistem manajemen yang baik akan berdampak pada terpenuhinya standar profesionalisme yang seharusnya ada pada SKPD-SKPD (Basuki dan Ridha, 2012).

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh komitmen manajemen terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Basuki dan Ridha (2012), Hastuti (2015), dan Dewi et. al. (2015) menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian yang sama juga dilaksanakan oleh Julita dan Belian (2015) dan Purnamasari (2015) dengan variabel yang sama menunjukkan bahwa komitmen manajemen tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dalam penilaian profesionalisme (Fardian, 2014). Kompetensi Sumber Daya Manusia yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakannya tugasnya secara profesional, efektif dan efisien (Keputusan Kepala BKN No 46A Tahun 2007).

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Fardian (2014) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian dengan variabel yang sama dilakukan oleh Purnamasari (2015) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial (Jones *et. al.*, 1985). Pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporannya (Mulyana, 2006).

Hasil penelitian terdahulu mengenai aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilaksanakan oleh Hastuti

(2015) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Penerapan transparansi pelaporan keuangan merupakan sebuah sistem atau tata cara dalam menciptakan sebuah hasil. Sebuah sistem pasti diatur oleh regulasi, hukum maupun perda terkait. Faktor politik berperan dalam menekan organisasi dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan dengan cara memberikan tekanan kepada pejabat terkait organisasi tersebut dan menerapkan sebuah kebijakan yang berguna dalam upaya penerapan transparansi pelaporan keuangan. (Fardian, 2014).

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh faktor politik terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Fardian (2014) menunjukkan bahwa faktor politik berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian dengan variabel yang sama dilaksanakan oleh Dewi et. al. (2015) menunjukkan bahwa faktor politik tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Basuki dan Ridha (2012) yang berjudul “Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.” Penelitian ini belum banyak dilaksanakan di daerah lain. Beberapa penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti lain, seperti Fardian (2014) di SKPD Pemerintah Kota Padang, dan Julita dan Belian (2015) di Pemerintah Kota Pekanbaru menunjukkan hasil yang berbeda.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, lokasi penelitian, periode penelitian, dan variabel penelitian. Lokasi yang digunakan oleh peneliti yaitu Kabupaten Magelang dan Kota Magelang pada tahun 2015. Peneliti menggunakan sampel SKPD di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang karena pada lokasi tersebut merupakan pemerintah daerah yang menerapkan transparansi pelaporan keuangan daerah. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan 3 (tiga) variabel, diantaranya kompetensi sumber daya manusia, aksesibilitas laporan keuangan, dan faktor politik.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi variabel independen, diantaranya tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, kompetensi sumber daya manusia, aksesibilitas laporan keuangan, dan faktor politik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tekanan eksternal berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan?
2. Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan?

3. Apakah komitmen manajemen berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan?
5. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan?
6. Apakah faktor politik berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan?
7. Apakah tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, kompetensi sumber daya manusia, aksesibilitas laporan keuangan, dan faktor politik berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh tekanan eksternal terhadap transparansi pelaporan keuangan.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai ketidakpastian lingkungan terhadap transparansi pelaporan keuangan.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai komitmen manajemen terhadap transparansi pelaporan keuangan.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai kompetensi sumber daya manusia terhadap transparansi pelaporan keuangan.

5. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pelaporan keuangan.
6. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai faktor politik terhadap transparansi pelaporan keuangan.
7. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, kompetensi sumber daya manusia, aksesibilitas laporan keuangan, dan faktor politik berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan.

E. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat di bidang teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi maupun bahan kajian dalam penelitian sejenis, tentang pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, kompetensi sumber daya manusia, aksesibilitas laporan keuangan, dan faktor politik terhadap transparansi pelaporan keuangan.

2. Manfaat di bidang praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang terkait pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, komitmen manajemen, kompetensi sumber daya manusia, aksesibilitas laporan keuangan, dan

faktor politik terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dan informasi mengenai pelaporan keuangan pada kegiatan-kegiatan pemerintah mendatang.